



PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) PADA LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MOJOKERTO

Azizah Fitriani

Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto, Program Studi Manajemen

| Artikel info | ABSTRAK |
|---|---|
| <p>Corresponding Author:</p> <p>Azizah Fitriani Azizah.fitriani@ubs-ppni.ac.id Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto</p> | <p>Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai manivestasi modal dasar sosial masyarakat yang mewakili seluruh masyarakat dengan penetapan melalui pemilihan secara terbuka. Dalam mengelola keuangan yang ada diBKM dengan perangkatnya sekretaris mengelola dan membuat laporang keuangan dengan menggunakan pembukuan sederhana yang sudah ditentukan system dan format pembukuannya oleh Tim program Kota Kumuh (KOTAKU). Tujuan kegiatan penguatan Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Pada Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Mojokerto adalah meningkatkan ketrampilan alur dan kebijakan pengelolaan keuangan BKM, penyusunan perencanaan keuangan dan meningkatkan kinerja pembukuan sekretariat BKM. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dari sosialisasi, diskusi, tanya jawab dan evaluasi. Hasil dari kegiatan penguatan pengelolaan keuangan BKM adalah adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Kebijakan Dan Alur Pengelolaan Keuangan BKM yang meliputi Pengendalian Simpanan Dana di Bank, Prosedur Penandatanganan Pengeluaran Dana Dari BKM, Pedoman Pengelolaan Kas, Inspeksi Mendadak Kas (Surprise Cash Count), Insentif Tenaga Unit Operasional (Sekretariat & UP-UP). Selanjutnya peserta juga mempunyai peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam kebijakan Sistem Pembukuan dan Kebijakan Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM.</p> <p>Kata kunci: <i>Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, BKM, Penguatan, Manajemen Keuangan</i></p> |
| <p>This article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)</p> | |

PENDAHULUAN

Lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada didesa memberikan kontribusi yang cukup penting dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan keluarga miskin. Program-program yang dijalankan BKM bersama-sama dengan masyarakat mempunyai tujuan untuk mengurangi permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang bersifat berkelanjutan mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesehatan. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dimulai

pelaksanaannya mulai tahun 1999 dimana kemudian diteruskan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dimulai tahun 2007. Dengan direalisasikan program-program di BKM yang direncanakan bersama-sama dengan masyarakat terutama keluarga miskin sebagai target sarannya maka dapat dirasakan kehidupan keluarga miskin menjadi lebih sejahtera dan dapat mengurangi kekumuhan lingkungan masyarakat baik kondisi rumah tempat tinggal maupun lingkungan disekitar tempat tinggal. Permukiman kumuh dicerminkan dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, banyaknya bangunan rumah dalam lahan yang terbatas dan kebutuhan sarana dasar dalam keluarga yang belum terpenuhi secara baik (Peraturan Pemerintah, 2016).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan program yang berkelanjutan mempunyai tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan tempat tinggal terutama untuk keluarga miskin diseluruh wilayah Indonesia dengan dimulainya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, pemerintah mempunyai target pengurangan wilayah kumuh sampai tercapai nol persen.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang disampaikan dalam harian Kompas.com Jernih melihat Dunia pada tanggal 24 Juli 2023 bahwa diperlukan adanya penataan kawasan kumuh yang dapat ditemui bangunan rumah dipinggiran bantaran sungai, dilingkungan sekitar tempat pembuangan sampah dan tempat tinggal yang berdesakan dilahan sempit dikawasan wilayah kota. (24/7/2023).

Berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/197/Hk/416-012/2023 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Mojokerto yang dimaksud dengan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten Mojokerto yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mojokerto meliputi sejumlah 15 (Lima belas) kawasan, 18 (delapan belas) desa, 3 (tiga) Kelurahan di 8 (delapan) Kecamatan, dengan luas total sebesar 297.07 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma nol tujuh) hektar. Dari 18 desa tersebut yang mendapat undangan untuk kegiatan penguatan pengelolaan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah 10 desa dengan daftar peserta sebagai berikut:

Tabel 1 : Daftar Nama BKM Peserta Kegiatan Penguatan Pengelolaan Keuangan BKM

| No | Kecamatan | Desa | Nama B/LKM |
|----|-----------|----------------|---------------------|
| 1 | Ngoro | Ngoro | Bina Sejahtera |
| 2 | Mojosari | Kauman | Budi Raharjo |
| 3 | Gedeg | Jeruk Seger | Sejahtera Mandiri |
| 4 | Gedeg | Terusan | Terusan Jaya Makmur |
| 5 | Gedeg | Kemantren | Karya Bersama |
| 6 | Sooko | Sooko | Sooko Sejahtera |
| 7 | Mojosari | Sumber Tanggul | Sumber Rejeki |
| 8 | Sooko | Jampirogo | Tridaya Sejahtera |
| 9 | Mojosari | Pekukuhan | Merdeka |
| 10 | Mojosari | Modopuro | Sejahtera |

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Mei 2024

Kegiatan penguatan pengelolaan keuangan BKM dilaksanakan dengan tujuan agar pengetahuan dan ketrampilan BKM dan sekretaris mengalami peningkatan yang diikuti oleh 30 peserta dari 10 BKM yang ada dalam wilayah permukiman kumuh sesuai dengan Keputusan Bupati kabupaten Mojokerto.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) mengelola dana untuk program-program yang telah direncanakan dan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan agar dapat menyusun laporan keuangan yang dapat memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas (Dewanti, 2015; Kartika, 2012). Permasalahan mitra adalah pengelolaan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) belum bisa berjalan secara maksimal dikarenakan belum dipahami dengan baik bagaimana pengelolaan keuangan dalam pembukuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan dalam pembukuan sederhana dengan format yang sudah disiapkan oleh program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Dirjen Cipta Karya Program KOTAKU OSP 8 Sultra. 2017. Hal ini terjadi karena ada pergantian beberapa anggota BKM dan sekretaris BKM sebagai pengelola keuangan. Hasil kinerja pembukuan sekretariat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) masih rendah.

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penguatan Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Pada Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Mojokerto mempunyai tujuan meningkatkan ketrampilan pengelolaan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan pentingnya perencanaan keuangan, meningkatkan kinerja pembukuan sekretariat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

METODE PELAKSANAAN

Tahapan dalam metode pelaksanaan penguatan pengelolaan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Pada tahapan sosialisasi dilakukan survey di lapangan ke kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk mengetahui permasalahan yaitu anggota BKM dan sekretaris masih membutuhkan penguatan pemahaman dalam mengelola

keuangan BKM sehingga dapat menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan format yang ditentukan oleh program KOTAKU. Dari hasil survey yang dilakukan pada 10 desa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dari 10 desa diketahui pemahaman anggota BKM dan sekretaris sebagai pengelola keuangan BKM beragam.

2. Pelaksanaan Penguatan Pengelolaan Keuangan BKM
 Dalam kegiatan Penguatan Pengelolaan Keuangan BKM dimulai dengan diskusi :
 - a. Diskusi tentang kebijakan dan alur pengelolaan keuangan BKM
 - b. Diskusi dan proses pembukuan dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
 - c. Diskusi dan proses penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja BKM
3. Pelaksanaan Penguatan Pengisian Instrument Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM
 Dalam kegiatan Penguatan Pengisian Instrument Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM dimulai dengan diskusi :
 - a. Diskusi tentang aspek-aspek pengukuran kinerja pembukuan sekretariat BKM
 - b. Diskusi dan proses pengukuran kinerja pembukuan 504ecretariat BKM dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
4. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penguatan Pengelolaan Keuangan BKM
 Kegiatan penguatan pengelolaan keuangan BKM akan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota BKM dan sekretaris sebagai pengelola keuangan. Keberhasilan dalam kegiatan penguatan pengelolaan keuangan BKM dapat diketahui dengan memberikan kuisioner kepada peserta untuk mengetahui respon peserta.

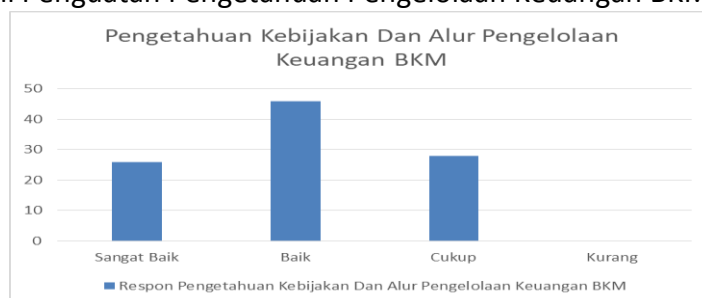
Tabel 2. Tujuan dan Indikator Penguatan Pengelolaan Keuangan

| NO | TUJUAN | INDIKATOR | INSTRUMEN |
|----|--|---|-----------|
| 1 | Meningkatkan ketrampilan pengelolaan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) | Mengetahui pengelolaan keuangan BKM sesuai dengan standar akuntansi keuangan | Angket |
| 2 | Meningkatkan ketrampilan penyusunan perencanaan keuangan (RAPB). | Mengetahui konsep kebijakan penyusunan perencanaan keuangan (RAPB). | Angket |
| 3 | Meningkatkan kinerja pembukuan sekretariat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). | Mengetahui konsep kebijakan kinerja pembukuan 504ecretariat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). | Angket |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Penguatan Pengelolaan Keuangan BKM dapat dijelaskan sebagai berikut

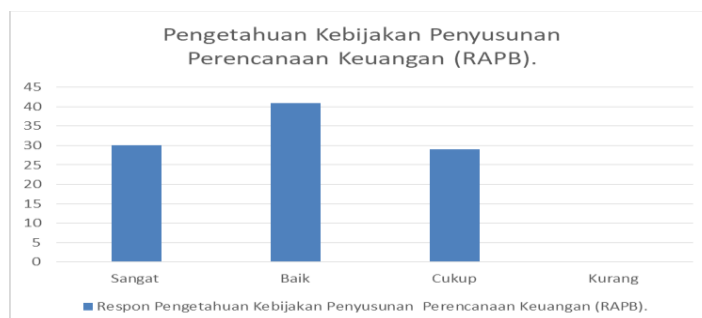
1. Evaluasi Hasil Penguatan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan BKM



Gambar 1. Respon Pengetahuan Kebijakan dan Alur Pengelolaan Keuangan BKM

Gambar tersebut mendeskripsikan bahwa presentase respon peserta untuk Pengetahuan Kebijakan dan Alur Pengelolaan Keuangan BKM pada kategori sangat baik sebesar 26 %, untuk kategori baik jumlahnya 46 %, kategori cukup menunjukkan jumlah 28 % dan kategori kurang jumlahnya 0 %. Dari hasil respon peserta yang mengikuti kegiatan penguatan dapat dijelaskan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan pengetahuan ketrampilan tentang kebijakan dan alur pengelolaan keuangan BKM.

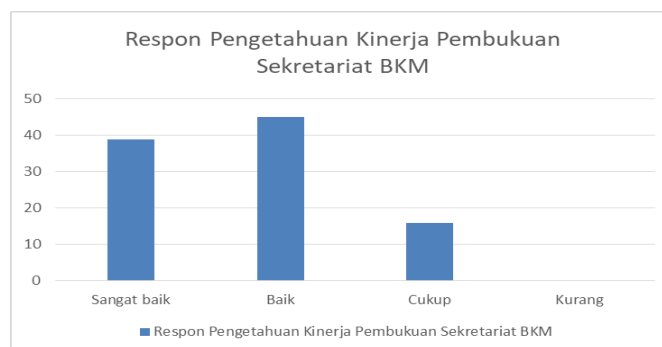
2. Evaluasi Hasil Penguatan Pengetahuan Kebijakan Penyusunan Perencanaan Keuangan (RAPB).



Gambar 2. Respon Pengetahuan Kebijakan Penyusunan Perencanaan Keuangan (RAPB)

Gambar tersebut mendeskripsikan bahwa presentase respon peserta untuk Pengetahuan Kebijakan penyusunan perencanaan keuangan (RAPB) dapat diketahui memperoleh respon sangat baik sejumlah 30 %, respon baik sejumlah 41 %, respon cukup sejumlah 29 % dan respon kurang sejumlah 0 %. Dari hasil respon peserta yang mengikuti kegiatan penguatan dapat dijelaskan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan pengetahuan dan ketrampilan tentang Kebijakan Penyusunan Perencanaan Keuangan (RAPB).

3. Evaluasi Hasil Penguatan Pengetahuan Kebijakan Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM



Gambar 3. Respon Pengetahuan Kebijakan Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM

Gambar tersebut mendeskripsikan bahwa presentase peserta untuk Pengetahuan Kebijakan Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM pada hasil sangat baik sebesar 39 %, hasil baik sebesar 45%, hasil cukup sebesar 16 % dan hasil kurang sebesar 0 %. Dari hasil respon peserta yang mengikuti kegiatan penguatan dapat dijelaskan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan pengetahuan ketrampilan tentang kebijakan Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM. Peserta kegiatan penguatan pengelolaan keuangan BKM setelah mengikuti kegiatan memperoleh pemahaman tentang kebijakan, alur dan prosedur pengelolaan keuangan dan pentingnya perencanaan keuangan (RAPB). Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan sekretaris untuk menyusun laporan secara benar dan tepat waktu, akan dapat meningkat kepercayaan masyarakat pada BKM. Dari kegiatan penguatan pengelolaan keuangan BKM yang sudah dilaksanakan dapat dijelaskan pembahasannya sebagai berikut :

Langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan BKM sebagai berikut :

a. Pengendalian dana simpanan di bank

Dalam pengelolaan keuangan BKM harus membuka Rekening bank BKM menggunakan identitas nama lembaga BKM. Pembukaan rekening simpanan di bank dengan nama lembaga BKM memerlukan validasi dengan ditanda tangani oleh tiga orang anggota BKM yaitu koordinator BKM dan 2 anggota BKM yang masih aktif. Penetapan anggota BKM sebagai penanda tangan spicement didasarkan atas musyawarah seluruh anggota BKM. Pencairan dana dari rekening BKM harus ditandatangani 3 spicement baik untuk pencairan secara tunai maupun secara transfer ke rekening KSM selaku panitia pelaksana program BKM.

b. Proses validasi transaksi keuangan BKM.

Setiap transaksi keuangan BKM baik untuk transaksi pengeluaran dana menggunakan bukti kas keluar (BKK) maupun transaksi penerimaan dana menggunakan bukti kas masuk (BKM) harus divalidasi oleh pengelola keuangan dan anggota BKM yang ditunjuk.

c. Pedoman Pengelolaan Kas

Dalam kegiatan operasional untuk mengelola dana tunai dari transaksi yang terjadi ditetapkan kebijakan bahwa saldo dana tunai maksimal sejumlah Rp. 1.500.000 dalam waktu 2 hari kerja.

d. Pengendalian dan pengawasan jumlah dana tunai BKM

Dalam usaha untuk mengendalikan dan mengawasi dana kas yang disimpan oleh sekretaris, BKM melakukan inspeksi mendadak secara periodik dengan melakukan pemeriksaan jumlah dana kas menurut catatan pembukuan dengan jumlah dana tunai yang disimpan yang ditulis dengan blangko pemeriksaan dana kas (Form Kas Opname).

e. Kebijakan alur dan Sistem Pembukuan

Didalam pengelolaan keuangan BKM menggunakan pedoman sistem pencatatan beruang kas pasangannya baik transaksi yang langsung berhubungan dengan uang tunai maupun transaksi yang masih bersifat terhutang.

Tahapan dalam pengelolaan keuangan BKM seperti dalam gambar berikut :



Gambar 4. Alur Pengelolaan Keuangan Dalam Pembukuan BKM

1) Kebijakan Penyusunan RAPB BKM.

Dalam melaksanakan program-program yang sudah direncanakan BKM diperlukan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Setiap akhir tahun BKM beserta dengan sekretaris dan UP-UP menyusun anggaran pendapatan dan belanja untuk 12 bulan ditahun yang akan datang. Penyusunan anggaran tersebut dengan mempertimbangan sumber dana yang akan diterima oleh BKM untuk mendanai semua program yang sudah ditetapkan.

Semua transaksi yang terjadi dicatat dalam sistem pembukuan oleh sekretaris secara kronologis mulai dari pencatatan buku kas dan bank harian, buku besar dan penyusunan laporan keuangan untuk setiap bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

- 1) Program penguatan pengelolaan keuangan BKM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penyusunan perencanaan keuangan (RAPB), meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kinerja pembukuan sekretariat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- 2) Setelah mengikuti kegiatan penguatan pengelolaan keuangan BKM peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang lebih meningkat tentang bagaimana kebijakan dan alur sistem keuangan BKM. Kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan BKM dimulai dengan rekening yang harus menggunakan nama lembaga, pengelolaan saldo dana tunai yang tidak boleh melebihi Rp. 1.500.000 dalam 2 hari kerja, semua pencatatan pengeluaran dan penerimaan dana berdasarkan bukti transaksi baik untuk bukti pengeluaran

kas maupun bukti penerimaan kas, selanjutnya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) untuk dana operasional BKM.

- 3) Kegiatan penguatan pengelolaan keuangan yang sudah dilaksanakan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sekretaris dan anggota BKM. Setelah mengiktui kegiatan penguatan sebaiknya ditidakanjuti dengan pendampingan yang intensif tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang benar berdasarkan system keuangan dan format yang ditentukan oleh program KOTAKU.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Ade Miranti Karunia , Akhdi Martin Pratama (24 Juli 2023) Pemerintah Targetkan Indonesia Bebas Kawasan Kumuh di 2024, Kompas Online, Diakses dari <https://money.kompas.com>
- Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/197/Hk/416-012/2023 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Mojokerto
- Dewanti, E.D.W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. Skripsi. Universitas Jember.
- Nafidah, L.N, & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntabilitas Vol. 10 NO. 2.
- Diansari, R.E. (2016). Analisis Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Metode Logic Model. Jurnal Akmenika Vol. 13
- Dirjen Cipta Karya Program KOTAKU OSP 8 Sultra. 2017. Modul Pelatihan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan.